

Penguatan Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi di SD Negeri Kotakulon 1 Bondowoso

Strengthening the value of honesty through anti-corruption education at SD Negeri Kotakulon 1 Bondowoso

Adistia Nurwahyuni*, Harizatun Najibah, Indri Maulani

Institut Agama Islam AT-TAQWA Bondowoso, Indonesia

* tianurwahyuni24@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Anti-corruption education, honesty values, habituation, primary school, civic education

Article History

Received: 2025-12-31
Accepted: 2026-01-18

This study aims to describe the application of anti-corruption education in strengthening honesty values among primary school students. The research used a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of two participants, namely the principal and one classroom teacher who were directly involved in implementing anti-corruption education at SDN Kotakulon 1 Bondowoso. The results showed that strengthening honesty values was carried out through habituation and role modeling, such as transparent management of class funds, habituation of academic honesty, and open activity reporting. Teachers served as key role models in the internalization of anti-corruption values, while family environmental factors became one of the obstacles affecting consistency of student behavior. The findings imply the importance of integrating habituation-based anti-corruption education in the learning process at primary schools, particularly within the context of Pancasila and Citizenship Education.

Copyright © 2026, Nurwahyuni et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.306](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.306)

1. PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia dan berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi pada level struktural dan kelembagaan, tetapi juga berakar pada persoalan nilai, sikap, dan karakter individu (Prasetyo, 2019). *Transparency International* secara konsisten menempatkan Indonesia pada kategori negara dengan indeks persepsi korupsi yang masih memerlukan penguatan upaya pencegahan berbasis nilai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi melalui pendekatan hukum dan penegakan aturan saja belum cukup efektif apabila tidak diiringi dengan pembentukan karakter sejak usia dini.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi karena menjadi ruang utama pembentukan nilai, sikap, dan perilaku peserta didik. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter moral dan sosial (Zubaedi, 2015). Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi dipahami sebagai upaya sistematis untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas kepada peserta didik agar mampu membentuk perilaku anti-koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Sekolah dasar merupakan fase fundamental dalam pembentukan karakter peserta didik karena pada tahap ini nilai moral dan kebiasaan perilaku mulai terbentuk dan terinternalisasi. Fenomena seperti menyontek saat ujian, ketidakjujuran dalam mengerjakan tugas, serta rendahnya tanggung jawab terhadap aturan sekolah menunjukkan bahwa penguatan nilai kejujuran masih menjadi kebutuhan mendesak (Komalasari, 2014). Apabila perilaku tersebut tidak ditangani sejak dini, maka berpotensi berkembang menjadi kebiasaan yang berlanjut hingga jenjang pendidikan berikutnya (Zuchdi, 2011).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peran strategis dalam membangun karakter kejujuran peserta didik. Wicaksono dan Hidayat (2023) menyatakan bahwa pembiasaan kejujuran melalui praktik nyata di sekolah dasar mampu membentuk perilaku jujur siswa secara bertahap. Santoso et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas pendidikan antikorupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi program serta dukungan lingkungan sekolah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa internalisasi nilai kejujuran sejak usia dini menjadi fondasi penting dalam pencegahan perilaku koruptif di masa depan (Yanto et al., 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah dasar cenderung difokuskan pada penguatan program dan kebijakan kelembagaan. Sementara itu, kajian yang secara mendalam mengulas bagaimana nilai kejujuran ditanamkan melalui praktik pembiasaan dan keteladanan guru dalam kehidupan keseharian peserta didik masih relatif terbatas. Selain itu, pembahasan yang mengaitkan pendidikan antikorupsi dengan pelaksanaan pembelajaran kontekstual dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) umumnya masih bersifat konseptual dan belum menggambarkan implementasi pembelajaran secara operasional (Hidayat & Suyanto, 2020).

Merujuk pada kondisi tersebut, penelitian ini memandang pendidikan antikorupsi sebagai bagian integral dari proses pembentukan karakter peserta didik yang berlangsung secara berkelanjutan dan kontekstual. Pendidikan antikorupsi tidak ditempatkan sebagai muatan tambahan dalam pembelajaran, melainkan diinternalisasikan melalui praktik pembiasaan sikap jujur, keteladanan guru, serta interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Pendekatan ini menempatkan sekolah sebagai ruang sosial yang berperan aktif dalam menumbuhkan nilai kejujuran pada diri peserta didik sejak usia dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn di sekolah dasar terefleksi pada capaian pembelajaran yang menekankan penguatan nilai moral dan kewarganegaraan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut disampaikan melalui materi PPKn yang berkaitan dengan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari, serta diperkuat melalui kegiatan pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik.

Secara praktis, muatan antikorupsi diwujudkan melalui pembelajaran kontekstual, antara lain dengan membahas contoh situasi sederhana mengenai perilaku jujur di lingkungan sekolah, membiasakan peserta didik menyelesaikan tugas secara mandiri dan jujur, serta menampilkan keteladanan guru dalam bersikap adil dan konsisten terhadap seluruh peserta didik. Selain itu, pelaksanaan proyek PPKn, seperti pengelolaan kegiatan kelas secara terbuka dan refleksi sikap setelah pembelajaran, menjadi sarana penting dalam proses internalisasi nilai antikorupsi secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dalam penelitian ini memberikan kontribusi konkret terhadap pengembangan pembelajaran PPKn di sekolah dasar. Kebaruan penelitian terletak pada penguatan nilai kejujuran yang dibangun melalui budaya sekolah dan praktik pembelajaran PPKn yang kontekstual, dengan dukungan pembiasaan, keteladanan guru, serta keterlibatan lingkungan eksternal sekolah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendidikan antikorupsi dalam memperkuat nilai kejujuran siswa sekolah dasar melalui pembiasaan dan keteladanan guru di SDN Kotakulon 1 Bondowoso. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi, serta kontribusi praktis bagi sekolah dalam merancang strategi penguatan nilai kejujuran yang berkelanjutan sejak usia dini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan pendidikan antikorupsi dalam memperkuat nilai kejujuran siswa di SDN Kotakulon 1 Bondowoso. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, proses, dan konteks sosial secara holistik sesuai dengan kondisi alami subjek penelitian (Moleong, 2017). Pendekatan ini dinilai tepat untuk mengkaji fenomena pendidikan karakter yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan dipahami melalui pengalaman dan praktik sosial yang berlangsung di lingkungan sekolah.

Subjek penelitian ini terdiri atas dua informan utama, yaitu kepala sekolah dan satu guru kelas yang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan posisi strategis, keterlibatan aktif, serta pengetahuan mendalam informan terhadap kebijakan dan praktik internalisasi nilai kejujuran yang diterapkan di lingkungan sekolah.

Dalam konteks penelitian kualitatif, jumlah informan tidak ditentukan oleh kuantitas, melainkan oleh kedalaman dan relevansi informasi yang diperoleh. Kepala sekolah diposisikan sebagai informan kunci karena memiliki peran sentral dalam penetapan kebijakan, penguatan budaya sekolah, serta pengawasan implementasi pendidikan karakter, termasuk nilai antikorupsi. Sementara itu, guru kelas dipilih karena berperan langsung dalam proses pembelajaran sehari-hari dan menjadi aktor utama dalam praktik pembiasaan serta keteladanan yang dialami peserta didik secara langsung.

Fokus penelitian diarahkan pada proses internalisasi nilai kejujuran melalui pembiasaan dan keteladanan dalam aktivitas pembelajaran dan budaya sekolah, sehingga data yang dibutuhkan lebih menekankan pada perspektif perencana dan pelaksana utama pendidikan antikorupsi. Dengan demikian, dua informan tersebut dianggap memadai untuk

menggambarkan praktik dan mekanisme internalisasi nilai kejujuran pada level kebijakan dan implementasi pembelajaran.

Meskipun demikian, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam cakupan perspektif informan. Penelitian belum secara langsung melibatkan siswa, orang tua, maupun guru lain yang juga berperan dalam praktik keseharian pendidikan antikorupsi. Keterbatasan ini berimplikasi pada kedalaman dan keluasan temuan, khususnya dalam menangkap pengalaman subjektif peserta didik dan dukungan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan informan yang lebih beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses internalisasi nilai kejujuran di sekolah dasar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta strategi yang diterapkan oleh pihak sekolah dalam menanamkan nilai kejujuran. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku siswa, praktik pembiasaan, serta keteladanan guru dalam aktivitas pembelajaran dan kegiatan sekolah sehari-hari. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip sekolah, catatan kegiatan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan antikorupsi.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk memilih dan memfokuskan data yang relevan, penyajian data dalam bentuk deskriptif naratif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar data yang ditemukan. Proses analisis dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan pendidikan antikorupsi dalam memperkuat nilai kejujuran siswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan nilai anti korupsi melalui pembiasaan dan keteladanan

Hasil penelitian dalam subbagian ini tidak hanya dipahami sebagai praktik pendidikan karakter secara umum, tetapi secara khusus dianalisis dalam kerangka pendidikan antikorupsi. Secara konseptual, pendidikan karakter mencakup penanaman berbagai nilai moral yang bersifat luas, sedangkan pendidikan antikorupsi memiliki fokus yang lebih spesifik pada penguatan nilai kejujuran, integritas, dan penolakan terhadap perilaku tidak jujur. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pembiasaan dan keteladanan guru berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai kejujuran sebagai indikator utama perilaku anti-koruptif peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai kejujuran di SDN Kotakulon 1 Bondowoso dilaksanakan melalui strategi pembiasaan dan keteladanan dalam aktivitas sekolah sehari-hari. Praktik seperti pengelolaan kas kelas secara transparan, pencatatan keuangan terbuka, serta pembiasaan tidak menyontek dalam evaluasi pembelajaran menjadi sarana utama internalisasi nilai antikorupsi. Pola ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi dihadirkan dalam pengalaman nyata yang dilakukan secara berulang dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru kelas yang menyatakan bahwa transparansi kas kelas sengaja diterapkan sebagai bagian dari pembelajaran kejujuran. Guru menjelaskan, “Setiap ada uang kas, anak-anak tahu jumlahnya berapa dan dipakai untuk apa. Saya biasakan dicatat dan dibacakan di kelas supaya mereka belajar jujur dan terbuka sejak kecil.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan kas kelas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran nilai antikorupsi.

Temuan observasi juga menunjukkan adanya pembiasaan kejujuran dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Saat kegiatan ulangan harian, guru menekankan pentingnya mengerjakan soal secara mandiri tanpa menyontek. Salah satu bentuk penguatan yang dilakukan adalah pemberian nasihat sebelum evaluasi dimulai, sebagaimana diungkapkan kepala sekolah dalam wawancara, “Kami lebih menekankan kejujuran daripada nilai. Anak-anak diingatkan bahwa menyontek itu bentuk ketidakjujuran yang harus dihindari.” Praktik ini memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi diwujudkan melalui pembiasaan sikap jujur yang konsisten dalam situasi nyata.

Dengan demikian, praktik transparansi kas kelas dan kejujuran dalam evaluasi pembelajaran tidak hanya menjadi bagian dari budaya sekolah, tetapi juga berfungsi sebagai indikator perilaku anti-koruptif yang secara sadar ditanamkan kepada peserta didik melalui pembiasaan dan keteladanan guru. Temuan ini memberikan manfaat praktis berupa terbentuknya kebiasaan jujur yang relatif stabil pada siswa karena nilai dipraktikkan secara langsung. Secara teoretis, hasil penelitian ini menguatkan konsep pendidikan karakter Lickona (1991) yang menempatkan moral action sebagai tahapan penting setelah pemahaman dan sikap moral. Selain itu, keteladanan guru sebagai figur sentral memperkuat teori pembelajaran sosial Bandura (1986), bahwa perilaku jujur lebih mudah diinternalisasi ketika siswa mengamati dan meniru model yang konsisten.



Gambar 1. Alur penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi (hasil analisis peneliti, 2025)

3.2. Integrasi nilai kejujuran dalam aktivitas pembelajaran kontekstual

Nilai kejujuran diintegrasikan dalam aktivitas pembelajaran kontekstual dan tidak diposisikan sebagai materi terpisah. Praktik kejujuran diwujudkan melalui tanggung jawab dalam tugas kelompok, kejujuran dalam penggunaan waktu belajar, serta kepatuhan terhadap aturan evaluasi. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa perilaku

antikorupsi tidak terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dalam aktivitas belajar.

Integrasi nilai dalam konteks nyata memberikan kontribusi terhadap pemahaman siswa yang lebih konkret dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Hasil ini mendukung temuan Wicaksono dan Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi lebih efektif ketika dikaitkan dengan pengalaman langsung peserta didik. Dari sisi teoritis, pendekatan ini sejalan dengan pandangan Vygotsky (1987) bahwa pembentukan nilai berkembang melalui interaksi sosial dan situasi pembelajaran yang bermakna.

Tabel 1. Bentuk implementasi pendidikan antikorupsi

Aspek Implementasi	Indikator Utama	Temuan
Pembiasaan	Transparansi kas kelas	Dilaksanakan secara konsisten
Keteladanan	Sikap jujur guru	Guru harus menjadi teladan yang paling utama
Pembelajaran kontekstual	Kejujuran dalam evaluasi	Terintegrasi dalam kegiatan belajar
Sinergi eksternal	Penyuluhan lembaga terkait	Mendukung penguatan nilai
Lingkungan keluarga	Konsistensi nilai	Menjadi faktor penghambat utama

Sumber: hasil analisis peneliti, 2025

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan nilai antikorupsi didukung oleh sinergi antara sekolah dan lembaga eksternal, seperti kepolisian dan kejaksaan. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak perilaku koruptif memberikan perspektif yang lebih luas kepada siswa tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sosial.

Sinergi ini memperkuat budaya integritas di sekolah dan memberikan legitimasi sosial terhadap nilai yang ditanamkan. Temuan ini sejalan dengan Santoso et al. (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan eksternal dan keberlanjutan program. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga melibatkan peran masyarakat secara kolaboratif.

3.3. Faktor penghambat implementasi pendidikan anti korupsi dan upaya mengatasinya

Meskipun pendidikan antikorupsi telah diterapkan secara konsisten, penelitian ini menemukan adanya hambatan yang terutama berasal dari lingkungan keluarga. Ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan di sekolah dan contoh perilaku di rumah menyebabkan sebagian siswa menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan kejujuran.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi sekaligus memperkaya teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner (1994) yang menempatkan keluarga sebagai mikrosistem utama dalam pembentukan perilaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan nilai kejujuran antara lingkungan sekolah dan keluarga menjadi salah satu hambatan dalam internalisasi nilai antikorupsi. Kondisi ini menegaskan bahwa

penguatan karakter tidak dapat bergantung pada satu sistem lingkungan saja, melainkan memerlukan interaksi yang selaras antara sekolah dan keluarga.

Dalam perspektif pendidikan karakter menurut Lickona (1991), temuan ini dapat dianalisis melalui tahapan moral knowing, moral feeling, dan moral action. Praktik pembiasaan dan keteladanan guru berperan dalam membangun moral knowing siswa melalui pemahaman tentang pentingnya kejujuran. Selanjutnya, komunikasi intensif antara sekolah dan orang tua serta pendekatan personal kepada siswa berkontribusi pada penguatan moral feeling, yakni tumbuhnya kesadaran dan komitmen emosional siswa terhadap nilai kejujuran. Tahap moral action tercermin ketika siswa mulai membiasakan perilaku jujur dalam situasi nyata, seperti tidak menyontek dan bersikap terbuka dalam aktivitas kelas.

Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori pembelajaran sosial Bandura (1986), yang menekankan bahwa perilaku moral terbentuk melalui proses observasi dan peniruan terhadap model yang signifikan. Keteladanan guru dan konsistensi sikap orang tua berfungsi sebagai model perilaku yang diamati dan ditiru oleh siswa. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas proses peniruan sangat dipengaruhi oleh konsistensi nilai antarlingkungan. Ketika terdapat perbedaan nilai antara rumah dan sekolah, internalisasi perilaku jujur menjadi kurang optimal, sehingga menuntut adanya intervensi kolaboratif.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya mendukung teori Lickona, Bandura, dan Bronfenbrenner, tetapi juga memperlihatkan bahwa pendidikan antikorupsi pada tingkat sekolah dasar memerlukan pendekatan integratif lintas lingkungan. Pendidikan antikorupsi menjadi lebih efektif ketika pembentukan pengetahuan moral, penghayatan nilai, dan tindakan moral diperkuat secara simultan melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial siswa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai kejujuran siswa sekolah dasar melalui pendidikan antikorupsi di SDN Kotakulon 1 Bondowoso terlaksana secara efektif melalui pembiasaan dan keteladanan yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah. Pendidikan antikorupsi tidak hanya disampaikan secara konseptual, tetapi diwujudkan melalui praktik nyata, seperti pengelolaan kas kelas secara transparan, pembiasaan tidak menyontek, kejujuran dalam mengerjakan tugas, serta keteladanan guru dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab. Pola ini mendorong internalisasi nilai kejujuran sebagai bagian dari perilaku sehari-hari siswa.

Integrasi nilai kejujuran dalam aktivitas pembelajaran kontekstual membantu siswa memahami makna antikorupsi secara konkret dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Selain itu, sinergi antara sekolah dan lembaga eksternal, seperti kepolisian dan kejaksaan, berkontribusi dalam memperluas pemahaman siswa mengenai pentingnya kejujuran sebagai nilai sosial yang berlaku tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang didukung oleh budaya sekolah dan kolaborasi lintas pihak berpotensi membentuk karakter anti-koruptif secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas serta cakupan lokasi penelitian yang hanya melibatkan satu sekolah dasar, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini belum secara mendalam mengkaji perspektif siswa dan orang tua sebagai bagian dari ekosistem pendidikan karakter. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak satuan pendidikan, memperluas subjek penelitian, serta menggunakan pendekatan metode campuran agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan antikorupsi sebagai bagian integral dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui pembiasaan, keteladanan, serta kolaborasi berkelanjutan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat guna membangun budaya kejujuran sejak usia dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta penugasan akademik sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan kajian pendidikan.

BIOGRAFI PENULIS

Adistia Nurwahyuni merupakan mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) At-Taqwa Bondowoso angkatan 2022 pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Fakultas Tarbiyah. Selain menempuh pendidikan akademik, penulis juga aktif sebagai pengajar anak-anak di TPQ Ruqayyah Sekarputih Bondowoso selama kurang lebih dua tahun. Pada tahap akhir studinya, penulis tengah menyusun skripsi sebagai bagian dari penyelesaian program sarjana.

Email: tianurwahyuni24@gmail.com

Harizatun Najibah merupakan mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam (IAI) At-Taqwa Bondowoso. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: rizaeca11@gmail.com

Indri Maulani merupakan mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam (IAI) At-Taqwa Bondowoso. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: indrimaulani2123@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Aksimudin, S. W. (2022). Instilling anti-corruption characters in civic education for collage students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 53-63. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45981>
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Sosial Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In International encyclopedia of education (Vol. 3, pp. 37-43). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01383-5>
- Channiago, E. G. (2022). Media and character education in preventing corruption in Indonesia. *The future challenges*, 1(2), 199-230.
- Hidayat, K., & Suyanto, S. (2020). Character education reinforcement in elementary school. *Journal of Primary Education*, 9(1), 1-9. <https://doi.org/10.15294/jpe.v9i1.34985>
- Kemntrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Komalasari, K. (2014). Pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(2), 223-234. <https://doi.org/10.21831/jpk.v4i2.2789>
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Nurtisna, A., & Zainil, M. (2025). Pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(2), 165-173. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.349>
- Pradnyamita, N. M. S. D. (2022). Penguatan nilai karakter serta pembentukan pendidikan humanistik melalui penanaman mindset antikorupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 143-155. <https://doi.org/10.23887/gancej.v4i1.1798>
- Purwati, Japar, Qomariyah, & Tentama. (2024). Moral knowing, moral feeling and moral action in reflecting moral development of students in junior high school. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 13(3), 1602-1609.
- Sakban, A., Budimansyah, D., Darmawan, C., & Syaifullah, S. (2025). Strengthening the Values of Honesty and Simplicity in Elementary School Children as Anti-Corruption Role Models. *Jurnal Obsesi. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 423-434.
- Santoso, A., Tentama, F., & Purwati, P. (2024). Measuring the quality of anti-corruption education using SERVQUAL model. *International Journal of Educational Research Review*, 9(2), 321-330. <https://doi.org/10.24331/ijere.1365482>
- Suyanto. (2010). *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Tilar, H. A. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Vygotsky, L. S. (1987). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wicaksono, A., & Hidayat, R. (2023). Pendidikan antikorupsi melalui pembiasaan kejujuran di sekolah dasar. *Jurnal Civics*, 20(2), 145–156. <https://doi.org/10.21831/civics.v20i2.52341>
- Yanto, M., Masuwud, M., & Wanto, D. (2024). Being a Moral Student: Content Analysis of Anti-Corruption Education Textbooks in Indonesia. *QALAMUNA. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 16(2), 67-80.
- Zubaedi. (2015). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zuchdi, D. (2011). Pendidikan karakter dalam perspektif teori dan praktik. *Cakrawala Pendidikan*, 30(3), 293–306.